Literasi Pajak atas Harta Warisan pada Masyarakat HKBP Perumnas 2 Bekasi

Lenny Panggabean¹, Jisman M. Lubis², Swanto Sirait³, Rudy S. Sinaga⁴, Beatrix Delfina⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: lenny.panggabean@uki.ac.id; jisman.lubis@uki.ac.id; swanto.sirait@uki.ac.id;
rudy.sinaga@uki.ac.id; beatriceptian299@gmail.com

Abstrak

Permasalahan atas harta warisan adalah hal yang cukup pelik di dalam kehidupan antar anggota keluarga. Harta warisan dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga terjadi bahkan banyak yang mengambil jalan pintas yakni melakukan pembunuhan antar keluarga hanya dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal yang lebih lanjut disebut sebagai pewaris. Selain permasalahan yang telah disebutkan diawal, terdapat masalah yang menjadi pertanyaan besar oleh setiap ahli waris yang mendapatkan harta waris adalah apakah harta warisan yang diperoleh harus dikenakan pajak dan bagaimana posisi harta warisan yang diperolehnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari ahli waris yang menerima harta warisan tersebut. Metode deksriptif dengan menggunakan data primer yang berasal dari kuisisioner Dari data kuisisioner dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman responden atas pajak warisan dapat dikategorikan rendah, sedangkan untuk tingkat kesadaran responden akan sanksi pajak tinggi namun hal ini berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan tahunan orang pribadi sehingga diperlukan pelatihan sosialisasi peraturan pajak terbaru sehingga responden yang merupakan masyarakat HKBP Perumnas 2 Bekasi merasa terbantu dan dapat meningkatkan kesadaran akan sanksi pajak dan peraturan perpajakan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Universitas sebagai tangan perpanjangan Direktorat Jenderal Pajak(DJP).

Kata Kunci: Pajak, Harta Warisan, Wajib Pajak, Obyek Pajak, SPT Tahunan

Abstract

Inheritance is a fairly complicated thing in the life between people family members. Inheritance can lead to disharmony in relationships among family members occurs even many who take shortcuts, namely commit murder between families only with the inheritance left behind by the deceased family member who is further referred to as the heir. Besides problems that have been mentioned earlier, there are problems that become the big question by every heir who gets the inheritance is whether the inheritance acquired must be taxed and what is the position of the property the inheritance obtained in the reporting of the Notification Letter (SPT) from the heir who receives the inheritance. Descriptive Methods Using Data Primers from Questionnaires Data from Questionnaires it can be concluded that respondents' level of understanding on inheritance tax can be categorized a slow, while the level of awareness of respondents about tax sanctions is high, but this inversely proportional to low levels of payment and reporting compliance An individual year so training / socialization of tax regulations is needed the latest so that respondents who are residents of HKBP Perumnas 2 Bekasi find it helpful and can raise awareness of tax and regulatory sanctions taxation that can be carried out by the Directorate General of Taxes (DGT) and the University as the extension arm of the Directorate General of Taxes (DGT)

Keywords: *Inheritance, Taxpayer, Tax Object, Annual SPT*

PENDAHULUAN

Harta peninggalan atau yang sering disebut harta warisan atau warisan merupakan permasalahan yang cukup pelik di dalam kehidupan antar anggota keluarga. Ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga terjadi baik orang tua dan anak maupun antar anak yang sering berakibat satu dengan yang lain berujung saling lapor-bahkan banyak yang mengambil jalan pintas yakni melakukan pembunuhan antar keluarga hanya dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal yang lebih lanjut disebut sebagai pewaris.

Selain faktor diatas adapula masalah yang menjadi pertanyaan oleh ahli waris yang mendapatkan harta waris adalah apakah harta warisan yang diperoleh harus dikenakan pajak dan bagaimana posisi harta warisan yang diperolehnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari ahli waris yang menerima harta warisan tersebut. Sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk membantu kebimbangan para ahli waris yang mendapatkan harta waris akan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Kegiatan pengabdian merupakan salah satu kegiatan rutin dosen tetap dalam rangka pelaksanaan tri dharma yang merupakan tugas wajib dosen setiap tahunnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh prodi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi UKI bekerja sama dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Perumnas 2 Bekasi bertujuan untuk menjabarkan permasalahan yang dihadapi oleh warga HKBP Perumnas 2 Bekasi tersebut terutama mengenai dilema akan harta warisan baik dari sisi hukum maupun dalam sisi perpajakannya. Kegiatan pengabdian tersebut dilakukan dengan dua metode yakni daring dan luring yang bertempat di HKBP Perumnas 2 Bekasi dalam bentuk penyuluhan dengan menyertakan kuisisioner.

Kegiatan pengabdian ini akan dipandu oleh pihak yang berkompeten yakni dari konsultan pajak yang akan memberikan edukasi pajak akan harta warisan sedangkan dosen hukum kenotariatan yang akan menjelaskan mengenai harta warisan dari sisi hukumnya mengingat permasalahan harta warisan tidak hanya dapat diselesaikan dari sisi pajak saja. Dalam kegiatan pengabdian ini akan membahas mengenai arti pentingnya dari warisan dan apakah warisan dikenakan pajak atau tidak oleh DJP.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan seminar dengan daring dan luring kepada jemaat HKBP Perumnas 2 Bekas dan masyarakat sekitar, dikarenakan situasi covid 19 yang belum usai menyebabkan seminar dilakukan dengan dua metode diatas.

Adapun judul dari kegiatan pengabdian ini adalah “ Apakah Harta Warisan Kena Pajak ?” yang bertujuan untuk menjabarkan permasalahan yang dialami oleh warga HKBP Perumnas 2 Bekasi beserta masyarakat sekitar yang mengalami masalah mengenai harta warisan baik dari sisi hukum maupun perpajakan, dengan menghadirkan dua pembicara yang kompeten dibidang hukum dan perpajakan, sehingga diharapkan segala permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Metode yang digunakan dalam kegiatan webinar dalam pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Edukasi/Penyuluhan

Sesuai dengan judul Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diangkat yakni “Apakah Harta Warisan Kena Pajak ?”, maka seminar ini menghadirkan pembicara dari dosen hukum kenotariatan Universitas Indonesia dan juga merupakan notaris senior yang membahas harta warisan dari segi hukum yakni Ibu Milly Karmila Sarael dan tidak lupa dari sisi pajak yang dipandu oleh seorang konsultan pajak senior dan juga merupakan dosen pajak yakni Bapak Afwan. Kedua pakar ini akan membahas hartawarisan dari bidang keilmuannya masing - masing sesuai dengan judul pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati.

b. Diskusi Interaktif atau tanya jawab setelah ceramah dilakukan, maka dilanjutkan dengan diskusi interaktif atau tanya jawab yang akan dibantu oleh Bapak Jisman Lubis yang merupakan moderator dalam acara seminar. Adapun tujuan dilaksanakan diskusi interaksi adalah untuk mengetahui seberapa jauh peserta webinar dalam hal ini jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi dan masyarakat sekitar memahami mengenai materi ceramah. Selain itu metode ini dilaksanakan untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan harta warisan baik dari sisi hukum maupun perpajakannya.

c. Kuesioner

Metode terakhir yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kuesioner. Pemakaian kuisisioner dalam kegiatan pengabdian ini dianggap sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat riset atau survey yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi maupun masyarakat sekitar yang mengikuti seminar baik dengan cara daring maupun luring. Kuisisioner yang dibagikan ketika acara pengabdian yang wajib diisi oleh setiap peserta baik yang mengikuti secara daring maupun luring pada gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama merupakan data diri dari responden yang melakukan pengisian terhadap kuisisioner yang terdiri dari pertanyaan seputar gender, usia dan penghasilan, bagian kedua adalah pemahaman responden terhadap pajak warisan yang terdiri dari 5 butir pertanyaan, bagian selanjutnya adalah mengenai pertanyaan seputar pemahaman responden terhadap sanksi pajak yang terdiri dari 4 butir pertanyaan dan bagian yang terakhir yakni pertanyaan seputar kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dalam hal ini adalah responden yang melakukan pengisian kuisisioner, untuk bagian ini terdiri dari 4 butir pertanyaan dimana software SPSS akan digunakan sebagai alat bantu analisa terhadap data yang terdapat pada kuisisioner dan menggunakan metode deksriptif dengan menggunakan yang berasal dari kuisisioner sebagai data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta peninggalan atau yang sering disebut sebagai warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang merupakan milik dari pewaris maupun hak - haknya tidak terkecuali hutang yang dimiliki oleh pewaris selama hidupnya.

Sehingga dapat dikatakan berdasarkan hukum waris barat yang tercantum dalam KUHPerdara, syarat yang harus ada ketika membicarakan warisan adalah ada orang yang meninggal dunia (pewaris), ada harta yang ditinggalkan dan yang terakhir adalah adanya ahli waris dimana menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pada pasalnya yang ke 832 menjelaskan yang termasuk dalam ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang - Undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama termasuk di dalamnya keberadaan anak yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya.

Harta yang ditinggalkan milik seseorang yang meninggal pasti akan diwariskan kepada para ahli warisnya, ini berarti harta yang diwariskan kepada ahli waris dapat menambah kekayaannya. Namun, UU PPh No 36 tahun 2008 pada Pasal 4 Ayat 3 menyatakan bahwa harta warisan bukan merupakan objek pajak. Walaupun warisan dapat dikatakan sebagai tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris, namun hal itu tidak serta merta dikatakan sebagai objek pajak yang termasuk didalamnya adalah semua jenis harta baik itu harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Ahli waris yang memberikan akta kematian atau surat wasiat kepada perbankan atau lembaga keuangan tempat menyimpan kekayaan, maka harta warisan tidak dianggap sebagai objek Pajak Penghasilan. Walaupun warisan dikategorikan sebagai bukan objek pajak, maka harus diperhatikan warisan itu sudah dibagi atau belum. Kewajiban perpajakan baru akan timbul ketika warisan tersebut mendatangkan penghasilan yang merupakan objek pajak.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan dengan menggunakan metode seminar yang bertajuk "Apakah Harta Warisan kena Pajak ?" pada Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi yang dilakukan dengan metode daring yang dihadiri oleh 59 peserta dan secara luring yang dilaksanakan di HKBP Perumnas 2 Bekasi dihadiri oleh 39 peserta.

Pada penjelasan metode diatas telah disebutkan bahwa kegiatan pengabdian ini mengikut sertakan kuesioner yang harus diisi oleh setiap peserta baik yang mengikuti secara daring maupun luring yang dibagi menjadi 4 bagian penting, Dimana pada bagian pertama merupakan data diri dari responden yang melakukan pengisian terhadap kuisisioner yang terdiri dari pertanyaan seputar

gender, usia dan penghasilan, bagian kedua adalah pemahaman responden terhadap pajak warisan yang terdiri dari 5 butir pertanyaan, bagian selanjutnya adalah mengenai pertanyaan seputar pemahaman responden terhadap sanksi pajak yang terdiri dari 4 butir pertanyaan dan bagian yang terakhir yakni pertanyaan seputar kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dalam hal ini adalah responden yang melakukan pengisian kuisisioner, untuk bagian ini terdiri dari 4 butir pertanyaan.

Berdasarkan data kuisisioner yang telah diisi oleh peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini dengan total kuisisioner yang dapat diperoleh berjumlah 98 kuisisioner sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti acara seminar pengabdian kepada masyarakat. Untuk bagian pertama yakni mengenai data diri dari responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta yang sekaligus merupakan responden jenis kelamin (gender) yang terbanyak adalah pria dengan jumlah responden 54 orang atau dapat dikatakan memiliki 55,1 % dan untuk responden diposisi kedua berjenis kelamin (gender) wanita dengan jumlah 44 responden atau sebanyak 44,9 % dari seluruh jumlah responden yang mengisi kuisisioner.

Rentang usia 41- 50 tahun merupakan rentang usia responden yang melakukan pengisian kuisisioner terbanyak yakni sebanyak 33 responden atau dengan kata lain memiliki persentase sebanyak 33,7 % dan responden yang mengisi kuisisioner dengan rentang usia yang paling sedikit adalah pada rentang usia 25 – 30 tahun dan 51 – 55 tahun yakni berjumlah masing – masing 9 responden atau memiliki 9,2%. atau dalam persen sebanyak 6,1 % adalah responden yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 20.000.001,- hingga Rp.40.000.000,- .

Jika ditelisik dari tingkat pendidikan responden terbanyak adalah pada tingkat sarjana (S1) dengan jumlah 37 responden atau sebanyak 37,8 persen. Untuk tingkat pendidikan doktoral (S3) merupakan jenjang pendidikan responden yang jumlahnya paling sedikit yakni hanya ada 2 responden atau dalam persentase hanya bernilai 2,0%.

Aspek yang terpenting dalam bagian data diri adalah pengetahuan responden akan pengetahuan pajak yang dimilikinya, dimana dalam kuisisioner ada 4 pilihan yakni responden memiliki pengetahuan pajak yang diperolehnya dari brevet pajak atau penyuluhan/sosialisasi perpajakan atau responden tidak memiliki pengetahuan pajak atau memiliki pengetahuan pajak diluar brevet pajak dan penyuluhan/sosialisasi perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisisioner yang diisi oleh responden yang berjumlah 98 orang dan diolah dengan menggunakan SPSS, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden banyak memilih jawaban lainnya yang berarti responden memiliki pengetahuan pajak yang diperoleh selain dari brevet pajak dan penyuluhan/sosialisasi dengan jumlah responden sebanyak 42 atau dapat dinyatakan sebesar 42,9%. Pada kenyataannya berdasarkan data kuisisioner, sedikit sekali responden yang memiliki pengetahuan pajak yang berasal dari brevet pajak, karena responden yang memilih pilihan tersebut hanya sebanyak 15,3 %.

Bagian kedua dari pertanyaan kuisisioner berisi 5 pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang dimiliki oleh 98 responden yang mengisi kuisisioner akan pajak warisan. Berdasarkan data 98 kuisisioner yang diisi dan dikembalikan oleh responden yang kemudian dilakukan pengolahan data maka dapat disimpulkan dari 98 jumlah responden yang mengisi yakni sebanyak 39 responden memiliki tingkat pemahaman yang rendah akan pajak warisan dan ini merupakan jumlah tertinggi yang disusul dengan 30 responden yang memiliki pemahaman yang tinggi terhadap pajak warisan yang hanya berada pada posisi kedua dan posisi terakhir adalah 29 responden yang memiliki pemahaman sedang akan pajak warisan.

Sehingga kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan tepat sasaran dalam menambah pemahaman akan responden yang dalam hal ini merupakan masyarakat HKBP Perumnas 2 Bekasi dan sekitarnya akan pajak warisan sehingga responden makin mengerti akan aturan pajak yang berlaku atas warisan yang dimilikinya.

Selain membahas mengenai pemahaman pajak warisan pada bagian kedua, kuisisioner ini juga berisi mengenai pertanyaan akan sanksi pajak yang dipahami oleh responden, Adapun tujuan

dibuat pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui apakah responden sadar akan ada dan berlakunya sanksi pajak atas wajib pajak baik yang berupa wajib pajak badan maupun orang pribadi termasuk didalamnya sanksi atas tidak diungkapkannya dan dilaporkannya pajak warisan yang telah dibagi di dalam SPT ahli waris.

Terdapat 4 pertanyaan yang dibuat untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dan pengetahuan responden akan sanksi pajak. Dari data yang diolah oleh perangkat lunak SPSS, maka dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang sudah paham dan sadar akan keberadaan sanksi pajak jika wajib pajak melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan, dimana diposisi pertama berjumlah 55 responden menjawab sudah sadar akan keberadaan sanksi pajak yang akan dikenakan jika responden melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini cukup membanggakan karena merupakan jumlah tertinggi dan sangat membanggakan karena responden yang juga merupakan wajib pajak telah sadar akan keberadaan sanksi pajak. Untuk posisi kedua masih di bagian ketiga yakni pertanyaan akan sanksi pajak sebanyak 33 responden memiliki pemahaman yang sedang akan sanksi pajak yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan terakhir sebanyak 10 responden masih memiliki pemahaman yang kurang akan sanksi pajak yang akan dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini dapat menyadarkan responden yang tidak lain juga merupakan wajib pajak orang pribadi akan adanya eksistensi sanksi pajak terhadap pelanggaran perpajakan baik itu dilakukan sengaja maupun tidak disengaja.

Bagian terakhir atau dapat disebut bagian empat memuat 4 pertanyaan yang harus diisi oleh responden mengenai kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Adapun maksud dan tujuan bagian ini dibuat dan harus diisi oleh responden adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan responden yang dalam hal ini merupakan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan yang merupakan kewajiban yang dimilikinya setiap tahunnya.

Berdasarkan data 98 responden yang telah diolah dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi teratas diduduki oleh 57 responden yang memiliki tingkat kepatuhan yang sedang terhadap pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan yang dimilikinya, disusul oleh 22 responden yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dan diposisi terakhir hanya 19 responden yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi akan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan yang dimilikinya. Hal ini dapat membuktikan bahwa masih banyak responden yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah akan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan, hal ini bisa dikarenakan tingkat penyuluhan/sosialisasi yang kurang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pihak universitas yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

SIMPULAN

Berdasarkan data Kuisisioner yang diperoleh dari responden yang melakukan pengisian terhadap kuisisioner yang dibagikan pada saat kegiatan pengabdian baik untuk peserta yang mengikuti secara daring maupun secara luring di HKBP Perumnas 2 Bekasi, dapat ditarik kesimpulan dari tingkat pemahaman responden atas pajak warisan dapat dikategorikan rendah, walaupun tingkat kesadaran responden akan sanksi pajak sudah cukup menggembirakan namun untuk tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dapat dikategorikan masih rendah, sehingga diperlukan pelatihan / sosialisasi peraturan pajak terbaru sehingga responden yang merupakan masyarakat HKBP Perumnas 2 Bekasi merasa terbantu dan dapat meningkatkan kesadaran akan sanksi pajak dan peraturan perpajakan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun universitas yang mau membantu dengan mengadakan pelatihan/sosialisasi terhadap peraturan perpajakan yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan HKBP Perumnas 2 Bekasi dan masyarakat sekitar pada tanggal 18 September 2022 yang dilaksanakan secara daring dan luring tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang secara penuh memberi dukungan kepada panitia dalam acara seminar pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

- Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian. Cet. 4. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. Dasar Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek. Bandung: Tarsito, 1988.
- Chairil Anwar Pohan. Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017
- Darmabrata, Wahyono. Asas-asas Hukum Waris Perdata. Cet. 1. Jakarta: 1994.
- Dinar, Fitri dan Hartanti (2020). Aplikasi Komputer Perpajakan. Graha Ilmu.
- Dewi, Sonny Judiasih. Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Di terjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2
- Latupono, Barzah. "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2015.
- Lenny, Beatrix Delfina, 2022. Serba – Serbi Nomor Pokok Wajib Pajak, Yogyakarta : KBM Indonesia
- Lenny Panggabean, Jisman M. Lubis, Swanto Sirait, Rudy S. Sinaga. Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Jemaat HKBP Sutoyo. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/3735/2238>. Diakses tanggal 20 September 2022
- Mardiasmo (2018). Perpajakan, Salemba Empat
- Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu BUDIARtha, Desak Gde Dwi Arini : Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>. Diakses tanggal 20 September 2022
- Oemarsalim. Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Warisan di Indonesia. Cet. 9. Bandung: Bale Bandung, 1988.
- Purwaka, I Gede. Keterangan Hak Mewaris Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Resmi, Siti (2019). Perpajakan : Teori dan Kasus. Salemba Empat
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Cet.2. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Cet.26. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Tamakiran. Asas-asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum. Cet.1. Bandung: Pionir Jaya. 1987
- Tamakiran. Asas-Asas Hukum Waris. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Waluyo (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat